

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, AidulFitriciada, 2000, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokrasi Menurut Konstitusi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hadi, Sutrisno, 1993, *Metode Research Jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset.
- J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaputra, Iswan, dkk, 2013, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- R.G. Kartasapoetra, Misdyanti, 1993, *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosidin, Utang, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia
- Saparin, Sumber, 1979, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Semarang: University Indonesia Press.
- Soemitro, RoniHanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widjaja, HAW, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alfaqih, Somadi, 2013, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Study di Desa Dumeleng Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes/Skripsi*, Yogyakarta: Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

## HALAMAN WEB

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bedd1f29158/status-peraturan-desa-setelah-berlakunya-uu-no.-12-2011> - diunduh pada 11 Mei 2014, pukul 20.05 wib

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.